

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau, UMKM telah mengimplementasikan prinsip *Green Economy* dalam operasionalnya yang tercermin dari analisis yang dilakukan menggunakan adopsi indikator oleh bank indonesia. proses produksi meliputi jenis dan penggunaan bahan baku, penggunaan sumber energi, dan pengolahan limbah produksi. Berdasarkan tahapan tersebut UMKM Hijau yang diteliti termasuk dalam tahapan *Eco-Adaptor*. Upaya ini mencerminkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya keberlanjutan dalam menjalankan bisnis. Namun, seperti halnya UMKM lainnya, UMKM Hijau juga membutuhkan dukungan yang lebih intensif terkait pengembangan usaha, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan, maupun akses pasar hijau.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hingga saat ini upaya terkait pemberdayaan umkm hijau masih terpaku pada wacana dan kampanye (*soft law*) temuan ini menguatkan relevansi terhadap teori pemberdayaan dalam konteks ekonomi hijau bahwa, pemberdayaan membutuhkan dukungan struktural dari pemerintah dalam bentuk kebijakan ataupun insentif yang konkret tidak hanya untuk mengubah perilaku namun juga mengembangkan umkm hijau.

4.2. Saran

Penguatan kebijakan yang mendukung UMKM Hijau harus menjadi prioritas strategis, mengingat regulasi yang jelas dan terarah merupakan prasyarat utama untuk memastikan tersedianya dukungan yang sesuai dengan karakteristik usaha. Kebijakan yang berlaku selama ini cenderung bersifat umum dan belum

mengakomodasi kebutuhan spesifik UMKM Hijau, sehingga diperlukan kajian komprehensif untuk memetakan kebutuhan tersebut dan menyelesaikannya dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Keberadaan kebijakan yang kuat juga berperan sebagai acuan operasional bagi perangkat daerah dalam merancang program pemberdayaan yang tepat sasaran dan implementatif. Dukungan yang dibutuhkan mencakup aspek pembiayaan berkelanjutan, penguatan kelembagaan dan legalitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pasar dan promosi, adopsi inovasi dan teknologi, serta perlindungan usaha. Tanpa intervensi kebijakan yang konkret dan kolaborasi lintas sektor, transformasi menuju ekonomi hijau berisiko stagnan, sedangkan dukungan yang konsisten dan terukur akan memperkuat kontribusi UMKM Hijau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, keterbatasan jumlah dan keragaman narasumber menyebabkan hasil penelitian belum mampu merepresentasikan seluruh tingkatan UMKM di Kota Semarang, mulai dari skala mikro hingga menengah. Hal ini dapat mempengaruhi kelengkapan data terkait kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di setiap level. Kedua, penelitian ini juga belum sepenuhnya menggali perspektif dari seluruh instansi pemerintah terkait, sehingga pemahaman mengenai sinergi antar lembaga dalam mendukung pengembangan UMKM hijau masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan narasumber yang lebih beragam, baik dari kalangan pelaku usaha maupun pemerintah lintas sektor, guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan representatif.